



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI MANADO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FRANGKI TAMBUNUN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 20368

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.415.000.000

1. Tanah Seluas 937 m2 di MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/300 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 431 m2/721 m2 di KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
5. Tanah Seluas 3797 m2 di MINAHASA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 5625.9 m2 di MINAHASA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 175.000.000
7. Tanah Seluas 2000 m2 di KOTA MANADO , WARISAN Rp. 115.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 735.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOBIL, TOYOTA JEEP/FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	674.603.838
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.824.603.838
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.824.603.838

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.